

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran belanja memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada pemerintahan daerah, anggaran menjadi instrumen utama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mardiasmo (2018), anggaran publik merupakan rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja yang disusun secara sistematis. Sejalan dengan pandangan tersebut, Lestari dan Purnamawati (2022) menegaskan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, sementara Verahastuti (2024) menambahkan bahwa peningkatan pembangunan nasional maupun daerah menuntut kebutuhan anggaran yang semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi syarat utama bagi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan anggaran di tingkat daerah diwujudkan melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memuat informasi mengenai pendapatan dan belanja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian program yang telah dilaksanakan. Kedua laporan ini saling melengkapi dalam menilai sejauh mana anggaran telah digunakan secara optimal dari sisi keuangan maupun kinerja fisik. Yuniarta dan Purnamawati (2020)

menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (Purnamawati et al., 2024).

Sebagai upaya mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, analisis pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana anggaran telah dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur perubahan belanja dari tahun ke tahun, sedangkan rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang ditetapkan (Renita et al., 2023). Melalui kedua rasio tersebut, pemerintah dapat menilai keberhasilan pelaksanaan program serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, pertumbuhan dan efektivitas belanja publik menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja keuangan daerah serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya publik (Zhafiri & Trisnaningsih, 2023).

Meskipun anggaran publik telah dirancang sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang efektif, permasalahan rendahnya realisasi belanja masih menjadi tantangan yang berulang di Indonesia, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa menjelang akhir tahun 2023, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp1.662,38 triliun atau sekitar 74% dari total pagu (Budiyanti, 2023). Kondisi ini menandakan masih adanya hambatan dalam penyerapan anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti perencanaan yang kurang matang, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, serta perubahan kebijakan sering menjadi penyebab utama rendahnya realisasi anggaran (Elim, 2018; Khafida, 2023). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun teori penganggaran telah menekankan pentingnya perencanaan dan pengendalian yang baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

Permasalahan rendahnya realisasi anggaran juga terlihat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan luas 1.365,88 km² dan memiliki jaringan jalan sepanjang 1.202,71 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 146,61 km, jalan provinsi 106,28 km, dan jalan kabupaten 949,82 km (BPS Provinsi Bali, 2024). Namun, sebagian besar jalan kabupaten tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut Kusuma (2024), jalan di Pratu Subrata sepanjang 700 meter telah rusak selama lebih dari lima tahun tanpa penanganan, sedangkan Prasetya (2025) melaporkan bahwa sekitar 200 kilometer jalan di Buleleng mengalami kerusakan berat. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Dinas PUTR Kabupaten Buleleng memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan kabupaten. Sejalan dengan pendapat Alex & Maulidiah (2024), dinas ini berperan penting dalam mengatur tata letak sarana dan prasarana daerah serta memastikan kegiatan pemeliharaan berjalan efektif. Oleh

karena itu, pengelolaan dan realisasi anggaran di Dinas PUTR perlu dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran agar anggaran yang tersedia mampu mendukung peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan Dinas PUTR dapat dievaluasi melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, gambaran nyata pelaksanaan anggaran dapat dilihat melalui data realisasi anggaran Dinas PUTR Kabupaten Buleleng pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas PUTR
Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng 2025)

| Tahun | Anggaran Belanja | Realisasi Belanja | Gap/Varian | Pertumbuhan | Efektivitas |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | 199.333.091.016 | 196.695.485.454 | -2.637.605.562 | 29,90% | 98,68% |
| 2021 | 124.523.395.540 | 99.661.651.054 | -24.861.744.486 | -49,33% | 80,03% |
| 2022 | 81.100.576.325 | 70.520.336.545 | -10.580.239.780 | -29,24% | 86,95% |
| 2023 | 87.598.225.449 | 61.844.741.706 | -25.753.483.743 | -12,30% | 70,60% |
| 2024 | 133.514.801.333 | 108.890.734.942 | -24.624.066.391 | 76,07% | 81,56% |

Pada tabel 1.1 menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Dinas PUTR Kabupaten Buleleng selama periode lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam kurun waktu lima tahun periode terjadi realisasi yang tidak memenuhi target, terlihat bahwa antara target dan realisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan realisasinya cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2024 realisasi anggaran meningkat sejumlah 76% dengan total peningkatan sejumlah Rp47.045.993.236. Namun realisasi anggaran belanja tahun 2024 tetap tidak mencapai rancangan anggaran yang telah direncanakan. Dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa dalam tiga tahun (2021-2023) penggunaan anggaran pada

Dinas PUTR selalu mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan realisasi anggaran dan efektivitas program kerja dalam pelaksanaan anggarannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja daerah, diantaranya Rahayu dan Ramdani (2021), Nasution dan Purba (2022), serta Armono et al. (2023) menemukan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada program kegiatan pemerintah daerah berada pada kategori cukup efektif. Namun, hasil analisis pertumbuhan anggaran menunjukkan adanya tren penurunan setiap tahun, yang disebabkan oleh menurunnya target anggaran serta adanya program yang tidak terlaksana sesuai rencana.

Berbeda dengan hasil tersebut, penelitian oleh Indiskayani et al. (2024), Gama et al. (2023), dan Cahyo (2024) menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas anggaran tergolong efektif, dengan capaian di atas 99%, meskipun rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021, sedangkan penurunan terlihat pada tahun 2020 dan 2022. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran dapat bervariasi di setiap daerah tergantung pada faktor perencanaan, pelaksanaan, serta kebijakan fiskal yang diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terlihat adanya perbedaan temuan terkait efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran daerah. Sebagian penelitian menunjukkan hasil yang cukup efektif, sementara penelitian lainnya menemukan pertumbuhan yang fluktuatif dan belum optimal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran belum memiliki hasil yang

konsisten di setiap daerah, tergantung pada kebijakan, perencanaan, serta kondisi kelembagaan masing-masing.

Sementara itu, dari sisi teori, konsep efektivitas dan pertumbuhan anggaran menjelaskan bahwa semakin baik perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019). Namun, teori tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya pada instansi teknis seperti Dinas PUTR yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, keterlambatan pengadaan, dan perubahan kebijakan. Kondisi ini menjadi kesenjangan penelitian yang menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami penerapan teori efektivitas dan pertumbuhan pada sektor publik daerah.

Penelitian ini penting dilakukan karena sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa belanja daerah harus dilaksanakan secara efisien, efektif, berprioritas, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan kualitas belanja yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, periode kajian, serta pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, yang hingga saat ini belum menjadi objek kajian serupa. Selain itu, penelitian ini tidak

hanya menganalisis efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran berdasarkan tahun anggaran, tetapi juga mengklasifikasikan analisisnya berdasarkan jenis belanja, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan anggaran. Metode penelitian ini juga dilengkapi dengan data wawancara langsung bersama pihak terkait di Dinas PUTR sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif.

Berdasarkan dasar pemikiran dalam latar belakang permasalahan dan pengamatan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertumbuhan dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui permasalahannya yakni:

1. Adanya penurunan dalam jumlah anggaran yang dibelanjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
2. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang tidak mencapai anggaran.
3. Belum terdapat evaluasi terhadap kinerja realisasi belanja dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan dan efektivitas dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah dimaksudkan untuk peneliti dapat menghindari pembahasan yang terlalu luas dan memastikan penelitian tetap pada jalurnya. Pada penelitian ini "Analisis Pertumbuhan dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024" peneliti memfokuskan hanya menganalisis pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja serta efektivitas program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng selama 5 tahun (2020-2024). Serta menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi penurunan serta capaian realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari identifikasi masalah dan batasannya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada periode 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada periode 2020-2024?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dan ketidakefektifan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024?

4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan dan ketidakefektifan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yakni:

1. Menganalisis tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada periode 2020-2024.
2. Menganalisis tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada periode 2020-2024.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dan ketidakefektifan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024.
4. Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan dan ketidakefektifan dalam realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terbaik secara teoritis maupun praktis, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan serta pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dan teori di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah, khususnya mengenai konsep pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanjanya. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi dan penyerapan anggaran guna mendukung pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang lebih baik.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya yang sedang meneliti topik pengelolaan anggaran pemerintah daerah, pertumbuhan dan efektivitas belanja publik, serta akuntansi sektor publik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai topik serupa atau mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan, variabel, atau studi kasus lain guna menghasilkan luaran yang lebih komprehensif dan bermanfaat.